

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian ini meneliti tentang analisis faktor – faktor yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak. Adapun penelitian terdahulu yang mendasari dalam penelitian ini beserta perbedaan dan persamaannya., antara lain:

No	Judul dan Tahun Penelitian	Peneliti	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Persepsi Wajib Pajak UMKM Terhadap Kecenderungan Negosiasi Kewajiban Membayar Pajak Terkait Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013	Titik Setyaningsih Ahmad Ridwan	Variabel Bebas : Presepsi Wajib Pajak UMKM Variabel Terikat : Negosiasi Kewajiban Membayar Pajak Terkait PP No 46 Tahun 2013.	Partisipan tidak sepenuhnya paham perpajakan yang berlaku dan walaupun beberapa partisipan telah mengena pada subtransi pajak namun alasan partisipan biar tidak ada masalah atau karena tidak punya pilihan yang mengakibatkan pada penyetoran pajak yang seadanya mengindikasikan bahwa partisipan sekedar berusaha menggugurkan kewajibannya.
2.	Analisis Persepsi Wajib Pajak Pemilik UMKM Terhadap Penetapan Kebijakan Pajak Penghasilan Final Sesuai Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 (Studi Pada Kpp Pratama Malang Utara) (2013)	Anisa Nurpratiwi Muhammad Saifi Otto Budihardjo	Variabel Bebas : Presepsi Wajib Pajak Pemilik UMKM Variabel Terikat : Penetapan Kebijakan Penghasilan Final sesuai PP No 6 Tahun 2013.	(1) asas convenience sebesar 3,75 kategori setuju Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 memenuhi asas tersebut,(2) asas efficiency dinyatakan pada interval sebesar 3,98 kategori setuju Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 memenuhi asas tersebut.(3) Persepsi wajib pajak tentang kebijakan pajak penghasilan final terhadap UMKM ditinjau dari asas certainty dinyatakan pada interval sebesar 2,44 kategori tidak setuju Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 memenuhi asas tersebut. (4) Persepsi wajib pajak tentang kebijakan pajak penghasilan final terhadap UMKM ditinjau asas equality dinyatakan pada interval sebesar 2,28 kategori tidak setuju

				Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 memenuhi asas tersebut.
3.	Persepsi Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (Ukm) Terhadap Penerapan Pp. 46 Tahun 2013 (2013)	Gandhys Resyniar	Variabel Bebas : persepsi pelaku UMKM Variabel Terikat : perubahan tarif dan dasar perhitungan, kemudahan dan penyederhanaan dengan maksud dikeluarkannya PP No.46 Tahun 2013	(1) Mayoritas Pelaku UMKM tidak setuju dengan adanya perubahan tarif dan dasar perhitungan pajak. (2) Pelaku UMKM sependapat bahwa adanya kemudahan dan penyederhanaan pajak dapat membantu masyarakat khususnya para pengusaha UMKM dalam membayar pajaknya. (3) Pelaku UMKM berpendapat bahwa maksud yang diusung dalam Peraturan Pemerintah nomor 46 tahun 2013 tidak dapat mengedukasi masyarakat untuk transparansi dalam pembayaran pajak. (4) Menurut Pelaku UMKM sosialisasi mengenai Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2013 masih kurang maksimal.
4.	Pengaruh Penerapan Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 Terhadap Tingkat Pertumbuhan Wajib Pajak Ukm Dan Penerimaan Pph Pasal 4 Ayat (2) (Studi Kasus Pada KPP Pratama Malang Selatan) (2013)	Astri Corry N Ds	Variabel Bebas : PP No 46 Tahun 2013 Variabel Terikat : Pertumbuhan Wajib Pajak UMKM dan Penerimaan PPH Pasal 4 Ayat (2)	Tingkat pertumbuhan jumlah Wajib Pajak PP No. 46 setiap bulannya terus mengalami peningkatan dan Kontribusi yang diberikan oleh Pajak UMKM terhadap penerimaan PPh Pasal 4 Ayat (2) selama kurun waktu lima bulan sejak diterapkannya PP No. 46 Tahun 2013 selalu Meningkat meskipun masih dalam kategori sangat kurang.
5.	Pemahaman Wajib Pajak Terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 Tentang Pajak UKM (Studi Kasus Pada Wajib Pajak Yang Terdaftar Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Ilir Barat) (2013)	Eunike Jacklyn Susilo Betri Sirajuddin	Variabel Bebas : pemahaman wajib pajak mengenai Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 Variabel Terikat : kemauan membayar pajak berdasarkan PP Nomor 46 Tahun 2013.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman masyarakat mengenai Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 masih sangat minim dan upaya pengenalan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 yang dilakukan pemerintah belum maksimal.

6.	Analisis Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Membayar Pajak Penghasilan	Debby Farihun Najib	Variabel Bebas : Kepatuhan Wajib Pajak Variabel Terikat : Tingkat pendidikan, Pemahaman tentang <i>self assessment</i> , pelayanan informasi perpajakan, dan pelaksanaan sanksi perpajakan.	Terdapat pengaruh antara tingkat pendidikan dan pelaksanaan sanksi perpajakan dengan kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam membayar pajak penghasilan.
----	---	---------------------	--	--

2.2 Landasan Teori

2.2.1 Teori - Teori Yang Mendukung Pemungutan Pajak

Terdapat beberapa teori yang menjelaskan atau memberikan justifikasi pemberian hak kepada negara untuk memungut pajak. Teori-teori tersebut antara lain sebagai berikut (Mardiasmo, 2011: 3):

1. Teori Asuransi

Negara melindungi keselamatan jiwa, harta benda, dan hak-hak rakyat. Oleh karena itu, teori ini mengibaratkan pembayaran pajak sebagai suatu pembayaran premi asuransi dimana rakyat akan memperoleh jaminan perlindungan tersebut.

2. Teori Kepentingan

Pembagian beban pajak kepada rakyat didasarkan pada kepentingan masing-masing orang. Semakin besar kepentingan seseorang terhadap negara, maka akan semakin tinggi pajak yang harus dibayar.

3. Teori Daya Pikul

Beban pajak untuk semua orang harus sama beratnya. Artinya, harus dibayar sesuai dengan daya pikul (kemampuan) masing-masing orang.

4. Teori Asas Daya Beli

Dasar keadilan terletak pada akibat pemungutan pajak. Dalam hal ini dimaksudkan bahwa memungut pajak berarti menarik daya beli dari rumah tangga masyarakat untuk rumah tangga negara. Selanjutnya Negara akan menyalurkan kembali ke masyarakat dalam bentuk pemeliharaan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, kepentingan seluruh masyarakat lebih diutamakan.

2.2.2 Pengertian Pajak

Pajak adalah salah satu penyumbang dana terbesar dari Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN). Pajak didefinisikan oleh beberapa ahli, diantaranya :

1. Menurut Rochmat Soemitro dalam Mardiasmo (2011 : 1) menyatakan bahwa:

Pajak adalah iuran kepada kas negara berdasarkan undang – undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan, dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

2. Sedangkan menurut S.I Djajadiningrat dalam Resmi (2011:1) menyatakan bahwa:

Pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung, untuk memelihara kesejahteraan secara umum.

Dari seluruh definisi pajak tersebut dapat disimpulkan bahwa :

1. Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya.
2. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah
3. Pajak dipungut oleh Negara baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah

4. Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah, yang bila dari pemasukannya masih terdapat surplus, digunakan untuk membiayai *public investment*.

2.2.3 Pengelompokan Pajak

Pengelompokan pajak dibagi menjadi tiga bagian, yaitu pengelompokan menurut golongannya, pengelompokan menurut sifatnya, dan pengelompokan menurut lembaga pemungutannya. Menurut Mardiasmo (2011:5) dijabarkan pengelompokan pajak tersebut sebagai berikut :

1. Pengelompokan menurut golongannya :
 - a. Pajak langsung, yaitu pajak yang dipikul sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.
Contoh : Pajak Penghasilan (PPh).
 - b. Pajak tidak langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.
Contoh : Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
2. Pengelompokan menurut sifatnya :
 - a. Pajak Subjektif, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya, dalam arti memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak.
Contoh : Pajak Penghasilan (PPh).
 - b. Pajak Objektif, yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak.
Contoh : Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan PPnBM.
3. Pengelompokan menurut lembaga pemungutannya

- a. Pajak Pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara.

Contoh : Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Materai, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan PPnBM.

- b. Pajak Daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah.

Contoh Pajak Daerah :

- i. Pajak Daerah Tingkat I, seperti Pajak Kendaraan Bermotor dan Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.
- ii. Pajak Daerah Tingkat II, seperti Pajak Pembangunan, Pajak Penerangan Jalan, dan Pajak Bangsa Asing.

2.2.4 Fungsi Pajak

Menurut Mardiasmo (2011:1) dijabarkan fungsi pajak tersebut sebagai berikut :

Ada dua fungsi pajak, yaitu :

1. Fungsi Budgetair
Pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran – pengeluarannya.
2. Fungsi mengatur (*regulerend*)
Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.

Contoh :

- a) Pajak yang tinggi dikenakan terhadap minuman keras untuk mengurangi konsumsi minuman keras
- b) Pajak yang tinggi dikenakan terhadap barang-barang mewah untuk mengurangi gaya hidup konsumtif
- c) Tarif pajak untuk ekspor 0%, untuk mendorong ekspor produk Indonesia di pasaran dunia.

2.2.5 Syarat Pemungutan Pajak

Pemungutan pajak harus memenuhi syarat agar tidak menimbulkan hambatan atau perlawanan. Menurut Mardiasmo (2011:2) pemungutan pajak harus memenuhi syarat sebagai berikut :

1. Pemungutan pajak harus adil (Syarat Keadilan)

Sesuai tujuan hukum, yaitu mencapai keadilan, undang-undang dan pelaksanaan pemungutan harus adil. Adil dalam arti perundang-undangan di antaranya mengenakan pajak secara umum dan merata serta disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Sementara adil dalam pelaksanaannya, yaitu dengan memberikan hak bagi Wajib Pajak (WP) untuk mengajukan keberatan, penundaan dalam pembayaran, dan mengajukan banding kepada Majelis Pertimbangan Pajak (MPP).

2. Pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang (Syarat Yuridis)

Di Indonesia, pajak di atur dalam UUD 1945 pasal 23 ayat 2. Hal ini memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan, baik bagi Negara maupun warganya.

3. Tidak mengganggu perekonomian (Syarat Ekonomis)

Pemungutan tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksi ataupun perdagangan sehingga tidak menimbulkan kelesuan perekonomian masyarakat.

4. Pemungutan pajak harus efisien (Syarat Finansial)

Sesuai fungsi budgetair, biaya pemungutan pajak harus dapat ditekan sehingga lebih rendah dari hasil pemungutannya.

5. Sistem pemungutan pajak harus sederhana

Sistem pemungutan yang sederhana akan memudahkan dan mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Syarat ini telah dipenuhi dalam undang-undang perpajakan yang baru.

2.2.6 Tata Cara Pemungutan Pajak

Tata cara pemungutan pajak terdiri atas stelsel pajak (Resmi, 2011:8) sebagai berikut:

1. Stelsel pajak

a) Stelsel nyata (Riil)

Stelsel ini menyatakan bahwa pengenaan pajak didasarkan pada objek yang sesungguhnya terjadi (untuk PPh maka objeknya adalah penghasilan). Oleh karena itu, pemungutan pajaknya baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak, yaitu setelah semua penghasilan yang sesungguhnya dalam suatu tahun pajak diketahui.

b) Stelsel anggapan (Fiktif)

Stelsel ini menyatakan bahwa pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh undang-undang. Sebagai contoh, penghasilan suatu tahun dianggap sama dengan penghasilan tahun sebelumnya sehingga pajak yang terutang pada suatu tahun juga dianggap sama dengan pajak yang terutang tahun sebelumnya. Dengan stelsel ini berarti besarnya pajak yang terutang pada tahun berjalan sudah dapat ditetapkan atau diketahui awal tahun yang bersangkutan.

c) Stelsel campuran

Stelsel ini menyatakan bahwa pengenaan pajak didasarkan pada kombinasi antara stelsel nyata dan stelsel anggapan. Pada awal tahun, besarnya pajak dihitung berdasarkan suatu anggapan, kemudian pada akhir tahun besarnya pajak dihitung berdasarkan keadaan sesungguhnya. Jika besarnya pajak berdasarkan keadaan sesungguhnya lebih besar daripada besarnya pajak menurut anggapan, wajib pajak harus membayar kekurangan tersebut. Sebaliknya, jika besarnya pajak sesungguhnya lebih kecil daripada besarnya pajak menurut anggapan, kelebihan tersebut dapat diminta kembali (restitusi) atau dikompensasikan pada tahun – tahun berikutnya, setelah diperhitungkan dengan utang pajak yang lain.

2.2.7 Asas Pemungutan Pajak

Terdapat tiga asas pemungutan pajak, yaitu (Resmi, 2011:10) :

1. Asas domisili (asas tempat tinggal)

Asas ini menyatakan bahwa Negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan wajib pajak yang bertempat tinggal di wilayahnya, baik penghasilan yang berasal dari dalam maupun luar negeri. Setiap wajib pajak yang berdomisili atau bertempat tinggal di wilayah Indonesia (wajib pajak dalam negeri) dikenakan pajak atas seluruh penghasilan yang diperolehnya baik dari Indonesia maupun dari luar Indonesia.

2. Asas Sumber

Asas ini menyatakan bahwa Negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber di wilayahnya tanpa memerhatikan tempat tinggal wajib pajak. Setiap orang yang memperoleh penghasilan dari Indonesia dikenakan pajak atas penghasilan yang diperolehnya tadi.

3. Asas kebangsaan

Asas ini menyatakan bahwa pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu Negara. Misalnya pajak bangsa asing di Indonesia dikenakan atas setiap orang asing yang bukan berkebangsaan Indonesia tetapi bertempat tinggal di Indonesia.

2.2.8 Sistem Pemungutan Pajak

Terdapat beberapa sistem pemungutan pajak , yaitu (Resmi,2011: 11):

a) Official Assessment System

Sistem pemungutan pajak yang member kewenangan aparatur perpajakan untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku. Dalam sistem ini, inisiatif serta kegiatan menghitung dan memungut pajak sepenuhnya berada di tangan para aparatur perpajakan. Dengan demikian, berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak banyak tergantung pada aparatur perpajakan (peranan dominan ada pada aparaturperpajakan).

b) Self Assessment System

Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang wajib pajak dalam menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

c) With Holding System

Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga yang ditunjuk untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Penunjukkan pihak ketiga ini dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan, keputusan presiden, dan peraturan lainnya untuk memotong dan memungut pajak, menyetor, dan mempertanggungjawabkan melalui sarana perpajakan yang tersedia. Berhasil atau tidaknya pelaksanaan pajak banyak tergantung pada pihak ketiga yang ditunjuk.

2.3 Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM)

Menurut Keputusan Presiden RI no. 99 tahun 1998 pengertian usaha kecil adalah kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil dengan bidang usaha yang secara mayoritas merupakan kegiatan usaha kecil dan perlu dilindungi untuk mencegah dari persaingan usaha yang tidak sehat.

Sedangkan menurut Undang-Undang No. 20 tahun 2008 tentang UMKM adalah usaha produktif milik orang perorangan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro, memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Adapun kriteria usaha mikro kecil dan menengah ditampilkan pada tabel dibawah ini, yaitu :

Tabel 2.2
Kriteria Usaha Mikro Kecil dan Menengah

Ukuran Usaha	Kriteria	
	Asset	Omzet
Usaha Mikro	Maksimal 50 juta	Maksimal 300 juta
Usaha Kecil	> 50 juta – 500 juta	Maksimal 300 juta
Usaha Menengah	> 500 juta – 10 milyar	> 2,5 – 50 milyar

Sumber : UU No. 20 Tahun 2008

2.4 Kepatuhan Wajib Pajak

Peraturan perpajakan yang dengan tegas mengatur tentang wajib pajak yang memenuhi kewajiban perpajakannya dengan keadaan sukarela atau kesadaran diri sendiri membutuhkan kepatuhan wajib pajak. Menurut Nuranto yang dikutip oleh Rahayu (2010:138), kepatuhan perpajakan dapat didefinisikan

sebagai suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya.

Sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 235/KMK.03/2003 tanggal 3 Juni 2003, Wajib Pajak yang ditetapkan sebagai Wajib Pajak patuh yang dapat diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak apabila memenuhi semua syarat sebagai berikut:

- a. Tepat dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan dalam 2 (dua) tahun terakhir.
- b. Dalam tahun terakhir penyampaian SPT Masa yang terlambat tidak lebih dari 3 (tiga) masa pajak untuk setiap jenis pajak dan tidak berturut-turut.
- c. SPT Masa yang terlambat itu disampaikan tidak lewat dari batas waktu penyampaian SPT Masa masa pajak berikutnya.
- d. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk setiap jenis pajak:
 1. Kecuali telah memiliki izin untuk mengangsur atau menunda untuk pembayaran pajak.
 2. Tidak termasuk tunggakan pajak sehubungan dengan STP yang diterbitkan untuk 2 (dua) masa pajak terakhir.
- e. Tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir.
- f. Dalam hal laporan keuangan diaudit oleh akuntan publik atau Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan harus dengan pendapat wajar tanpa pengecualian atau dengan pendapat wajar dengan pengecualian sepanjang pengecualian tersebut tidak mempengaruhi laba rugi fiskal

2.5 Pengertian Pajak Penghasilan

Menurut Priantara (2012:179) pengertian pajak penghasilan adalah pajak yang dikelola oleh pemerintah pusat dan memberikan kontribusi signifikan kepada penerimaan Negara. Sedangkan menurut Resmi (2011:74) pajak penghasilan (PPh) adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam suatu tahun pajak. Dasar hukum PPh adalah Undang-Undang No. 36 Tahun 2008.

Sehubungan dengan adanya peraturan pemerintah nomor 46 tahun 2013 tentang wajib pajak orang pribadi atau badan kecuali wajib pajak non Badan Usaha Tetap (BUT) yang memiliki usaha dengan peredaran bruto dibawah Rp 4,8 miliar dalam satu tahun fiskal diberlakukan oleh pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak dengan pajak penghasilan bersifat final sebesar 1% dari peredaran bruto.

2.6 PP NO. 46 TAHUN 2013

Menurut PP No. 46 Tahun 2013 tentang pajak penghasilan wajib pajak dengan peredaran bruto tertentu memberikan pengertian bahwa atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu, dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final. Tarif dasar yang dikenakan adalah 1 persen dari peredaran bruto dalam satu tahun pajak terakhir sebelum tahun pajak bersangkutan.

Peraturan pemeritah nomor 46 tahun 2013 menjelaskan cara menentukan peredaran bruto yang akan dijadikan sebagai dasar perhitungan. Peredaran bruto yang tidak melebihi Rp 4,8 miliar ditentukan berdasarkan

peredaran bruto setiap bulan, tidak termasuk dari peredaran bruto penghasilan yang diterima atau diperoleh dari luar negeri, usaha yang atas penghasilannya telah dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan tersendiri, dan penghasilan yang dikecualikan sebagai objek pajak.

Wajib pajak yang dikenai PPh final berdasarkan PP No.46 Tahun 2013 dan menyelenggarakan pembukuan dapat melakukan kompensasi kerugian (*Lost Carry Forward*) dengan penghasilan yang tidak dikenakan PPh final sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku. Untuk penghitungan, penyeteroran, dan pelaporannya peraturan pemerintah nomor 46 tahun 2013 diatur berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan. Diharapkan dengan diberlakukannya peraturan pemerintah nomor 46 tahun 2013 dapat membantu wajib pajak untuk mempermudah memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.

2.7 Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak UMKM didalam membayar pajak penghasilan sesuai dengan PP No. 46 Tahun 2013 yang akan diteliti dalam penelitian ini, antara lain tingkat pendidikan, pemahaman *self assessment*, pelayanan informasi perpajakan, dan pelaksanaan sanksi perpajakan.

2.7.1 Tingkat Pendidikan

Menurut UU No. 20 Tahun 2003, tentang sistem pendidikan nasional, pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar

dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta ketrampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan Negara.

Tingkat pendidikan merupakan salah satu faktor terpenting yang ada didalam kehidupan masyarakat. Dengan adanya tingkat pendidikan maka tingkat pengetahuan masyarakat pada umumnya juga akan sangat luas berdasarkan tingkat pendidikan yang masyarakat ambil. Begitu juga dalam perpajakan, tingkat pendidikan berpengaruh terhadap pemahaman wajib pajak mengenai hak dan kewajiban wajib pajak serta peraturan tentang perpajakan. Diharapkan dengan semakin tinggi tingkat pendidikan wajib pajak maka semakin tinggi pula tingkat pengetahuan yang wajib pajak miliki sehubungan dengan kesadaran mereka akan tujuan dan manfaat dalam membayar pajak.

2.7.2 Pemahaman Self Assessment

Menurut Arikunto (2009: 118) yang dikutip oleh Najib (2013) menyatakan bahwa pemahaman (*comprehension*) adalah bagaimana seorang mempertahankan, membedakan, menduga (*estimates*), menerangkan, memperluas, menyimpulkan, menggeneralisasikan, memberikan contoh, menuliskan kembali, dan memperkirakan.

Pemahaman *self assessment* adalah pemahaman yang diterapkan di indonesia dengan *self assessment system* sebagai sistem perpajakan yang digunakan oleh wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Dengan *self assessment system*, wajib pajak diharapkan mampu untuk menentukan dan

menghitung sendiri seberapa besar pajak terutang yang dimiliki oleh wajib pajak. Wajib pajak diharapkan dapat mengetahui dan memahami peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia dengan menjadikan wajib pajak sebagai *tax payer active*.

2.7.3 Pelayanan Informasi Perpajakan

Kualitas layanan adalah pelayanan yang dapat memberikan kepuasan kepada pelanggan dan tetap dalam batas memenuhi standar pelayanan yang dapat dipertanggungjawabkan serta harus dilakukan secara terus-menerus. Secara sederhana definisi kualitas adalah suatu kondisi dinamis yang berhubungan dengan produk, jasa manusia, proses, dan lingkungan yang memenuhi atau melebihi harapan pihak yang menginginkannya. (Hardiningsih dan Yulianawati, 2011). Sedangkan menurut Jotopurnomo dan Mangoting (2013:50) Pelayanan sendiri pada sektor perpajakan dapat diartikan sebagai pelayanan yang diberikan kepada Wajib Pajak oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk membantu Wajib Pajak memenuhi kewajiban perpajakannya. Pelayanan pajak termasuk dalam pelayanan publik karena dijalankan oleh instansi pemerintah, bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat maupun dalam rangka pelaksanaan undang-undang dan tidak berorientasi pada profit atau laba.

Dengan memberikan pelayanan informasi perpajakan yang baik terhadap wajib pajak, diharapkan wajib pajak akan mendukung *self assessment system* lebih baik lagi dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

2.7.4 Pelaksanaan Sanksi Perpajakan

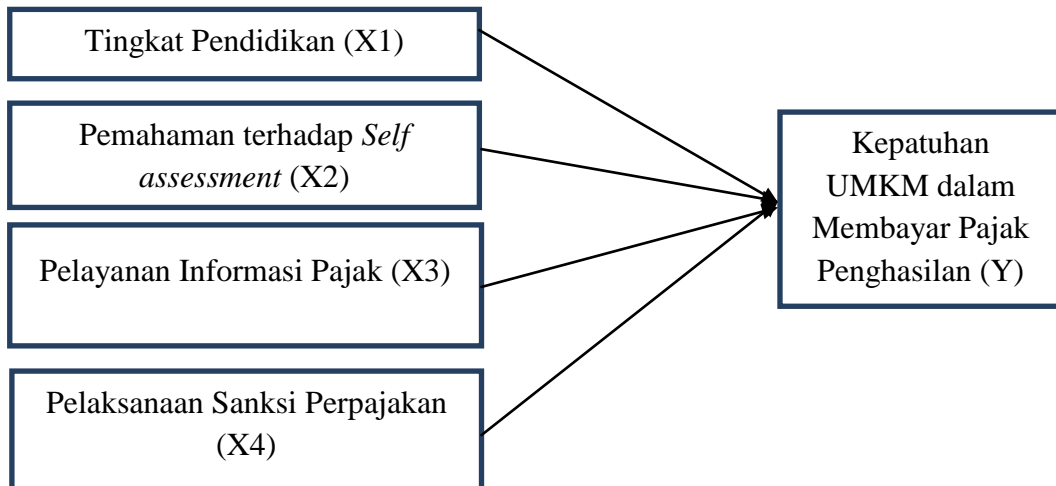
Menurut Jatmiko (2006) Sanksi adalah hukuman negatif kepada orang yang melanggar peraturan, dan denda adalah hukuman dengan cara membayar uang karena melanggar peraturan dan hukum yang berlaku, sehingga dapat dikatakan bahwa sanksi denda adalah hukuman negatif kepada orang yang melanggar peraturan dengan cara membayar uang.

Undang-undang dan peraturan secara garis besar berisikan hak dan kewajiban, tindakan yang diperkenankan dan tidak diperkenankan oleh masyarakat. Agar undang-undang dan peraturan tersebut dipatuhi, maka harus ada sanksi bagi pelanggarnya, demikian halnya untuk hukum pajak (Suyatmin, 2004). Saefudin (2003) mengemukakan bahwa UU pajak dan peraturannya tidak memuat jenis penghargaan bagi WP yang taat dalam melaksanakan kewajiban perpajakan baik berupa prioritas untuk mendapatkan pelayanan publik ataupun piagam penghargaan. Walaupun WP tidak mendapatkan penghargaan atas kepatuhannya dalam melaksanakan kewajiban perpajakan, WP akan dikenakan banyak hukuman apabila alfa atau sengaja tidak melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Pelaksanaan sanksi perpajakan dipandang sangat perlu dalam hal pembayaran pajak. Oleh karena itu, dengan adanya pelaksanaan sanksi perpajakan, diharapkan wajib pajak dapat lebih patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

2.8 Kerangka Konseptual

Berdasarkan landasan teori yang sudah diajukan, maka disusun kerangka konseptual penelitian berikut ini :



Gambar 2.1

Kerangka Pemikiran

2.9 Pengembangan Hipotesis

2.9.1 Pengaruh Tingkat Pendidikan Terhadap Kepatuhan UMKM Dalam Membayar Pajak Penghasilan Sesuai Dengan PP No. 46 Tahun 2013

Menurut Fallan (1999:141) yang dikutip oleh Rahayu (2010), pentingnya aspek pengetahuan perpajakan bagi wajib pajak sangat mempengaruhi sikap wajib Pajak terhadap system perpajakan yang adil. Dengan kualitas pengetahuan yang semakin baik akan memberikan sikap memenuhi kewajiban dengan benar melalui adanya system perpajakan suatu Negara yang dianggap adil. Dengan meningkatnya pengetahuan perpajakan masyarakat melalui pendidikan

perpajakan baik formal maupun nonformal akan berdampak positif terhadap pemahaman dan kesadaran Wajib Pajak dalam membayar pajak.

Berdasarkan hal tersebut, maka hipotesis yang diajukan peneliti adalah

H1 : tingkat pendidikan wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan UMKM dalam membayar pajak penghasilan sesuai PP No. 46 tahun 2013.

2.9.2 Pengaruh pemahaman *self assessment* terhadap kepatuhan UMKM dalam membayar pajak penghasilan sesuai dengan PP No. 46 Tahun 2013.

Sistem perpajakan yang sedang berlaku di Indonesia saat ini adalah *self assessment system*, dimana wajib pajak diberi wewenang memenuhi kewajiban perpajakan dengan menentukan sendiri pajak terutang yang harus dibayar. Menurut hasil penelitian Syahril (2013) yang menyatakan tingkat pemahaman wajib pajak berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan hal tersebut, maka hipotesis yang diajukan peneliti adalah sebagai berikut :

H2: Pemahaman terhadap *self assessment* berpengaruh terhadap kepatuhan UMKM dalam membayar pajak penghasilan sesuai PP No. 46 tahun 2013.

2.9.3 Pengaruh pelayanan informasi perpajakan terhadap kepatuhan UMKM dalam membayar pajak penghasilan sesuai dengan PP No. 46 Tahun 2013.

Menurut pranadata (2014) Kualitas pelayanan pajak merupakan salah satu hal yang meningkatkan minat wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya dan diharapkan petugas pelayanan pajak harus memiliki kompetensi yang baik terkait segala hal yang berhubungan dengan perpajakan di

Indonesia. Pelayanan pajak diberikan kepada wajib pajak dimaksudkan agar wajib pajak dapat memenuhi kewajiban perpajakan dengan baik dan lancar. diharapkan dengan adanya pelayanan pajak, wajib pajak dapat memberikan persepsi positif terhadap pelayanan pajak yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Berdasarkan hal tersebut, maka hipotesis yang diajukan peneliti adalah sebagai berikut :

H3: Pelayanan informasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan UMKM dalam membayar pajak penghasilan sesuai PP No. 46 tahun 2013.

2.9.4 Pengaruh pelaksanaan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan UMKM dalam membayar pajak penghasilan sesuai Dengan PP No. 46 Tahun 2013.

Sistem perpajakan yang berlaku di Indonesia adalah *self assessment system*. Wajib pajak diberikan wewenang untuk menentukan sendiri pajak terutang yang akan dilunasi oleh wajib pajak. Meskipun wajib pajak telah diberikan kepercayaan dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, pelaksanaan sanksi perpajakan terhadap wajib pajak yang tidak patuh atau denda atas keterlambatan membayar pajak menjadi hal wajib untuk wajib pajak. Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa wajib pajak diharapkan dapat memenuhi kewajiban perpajakan dengan sadar dan patuh terhadap aturan yang berlaku. Menurut Jotopurnomo dan Mangoting (2013) sanksi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Surabaya, begitu juga menurut Najib (2013) yang menyatakan pelaksanaan sanksi perpajakan

berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Berdasarkan hal tersebut, maka hipotesis yang diajukan peneliti adalah sebagai berikut :

H4 Pelaksanaan sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan UMKM dalam membayar pajak penghasilan sesuai PP No. 46 tahun 2013.